

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek

Laju kenaikan kesempatan kerja tidak sebanding dengan kenaikan jumlah penduduk di Indonesia. Hal ini menimbulkan banyak pengangguran dan peningkatan kriminalitas. Tindakan kriminal yang terjadi, membutuhkan suatu wadah penanganan yaitu Rumah Tahanan Negara. Rumah Tahanan Negara adalah tempat untuk membina tahanan dengan membatasi ruang gerak mereka, sementara menunggu proses hukum, sekaligus bertujuan membina pelaku kejahatan agar mengoreksi diri dan tidak mengulangi tindakan pidana.

Rumah Tahanan Negara mempunyai fungsi vital sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara, sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di sidang pengadilan Indonesia. Lembaga institusi tersebut bertugas membina ketertiban para pelanggar hukum selama proses hukum berjalan, dengan harapan, tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kotamadya wajib dibentuk Rumah Tahanan Negara. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia hingga saat ini ialah banyak kabupaten dan kotamadya di Indonesia tidak memiliki Rumah Tahanan Negara. Sehingga Rumah Tahanan Negara digunakan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, telah melampaui kapasitas, karenanya tahanan yang sudah menjalani masa hukuman di Rutan, tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai dan tidak dipindah ke Lapas.

Tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang berada dalam proses peradilan dan masih menunggu vonis/keputusan dari majelis hukum. Tahanan ditahan dengan pertimbangan adanya kemungkinan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidananya, sehingga membahayakan masyarakat.

Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Februari tahun 2017 di Kabupaten Magelang tidak memiliki Rumah Tahanan Negara. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan tingkat ketersediaan ruang pada Rumah Tahanan Negara dan tingkat kelebihan kapasitas yang terjadi pada Lembaga Rumah Tahanan Negara Jawa Tengah.

No	UPT	Kanwil	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas	
			DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	LAPAS KELAS I BATU NUSAKAMBANGAN	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	0	361	0	361	0	0	0	0	361	361	750	48	0
2	LAPAS KELAS I SEMARANG	KANWIL JAWA TENGAH	587	0	587	9	0	9	596	698	0	698	10	0	10	708	1,304	569	229	129
3	LAPAS KELAS II A AMBARAWA	KANWIL JAWA TENGAH	62	0	62	0	0	0	62	256	0	256	0	0	0	256	318	222	143	43
4	LAPAS KELAS II A BESI NUSAKAMBANGAN	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	162	215	75	0	
5	LAPAS KELAS II A KEMBANG KUNING NUSAKAMBANGAN	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	156	275	57	0	
6	LAPAS KELAS II A KENDAL	KANWIL JAWA TENGAH	72	0	72	2	0	2	74	117	1	118	0	0	118	192	126	152	52	
7	LAPAS KELAS II A MAGELANG	KANWIL JAWA TENGAH	99	8	107	0	0	0	107	330	10	340	6	0	6	346	453	221	205	105
8	LAPAS KELAS II A PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	169	336	50	0	
9	LAPAS KELAS II A PEKALONGAN	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	0	460	0	460	0	0	0	460	460	800	58	0	
10	LAPAS KELAS II A PERMISAN NUSAKAMBANGAN	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	158	221	71	0	
11	LAPAS KELAS II A PURWOKERTO	KANWIL JAWA TENGAH	57	0	57	0	0	0	57	282	0	282	2	0	2	284	341	111	307	207
12	LAPAS KELAS II A SRAGEN	KANWIL JAWA TENGAH	39	0	39	0	0	0	39	201	0	201	0	0	0	201	240	400	60	0
13	LAPAS KELAS II B BREBES	KANWIL JAWA TENGAH	49	3	52	0	0	0	52	163	5	168	5	0	5	173	225	250	90	0
14	LAPAS KELAS II B CILACAP	KANWIL JAWA TENGAH	131	4	135	3	0	3	138	197	6	203	0	0	0	203	341	315	108	8
15	LAPAS KELAS II B KLATEN	KANWIL JAWA TENGAH	57	6	63	0	0	0	63	231	7	238	5	0	5	243	306	353	87	0
16	LAPAS KELAS II B PATI	KANWIL JAWA TENGAH	97	1	98	0	0	0	98	177	2	179	0	0	0	179	277	114	243	143
17	LAPAS KELAS II B SLAWI	KANWIL JAWA TENGAH	57	0	57	0	0	0	57	274	0	274	0	0	0	274	331	144	230	130
18	LAPAS KELAS II B TEGAL	KANWIL JAWA TENGAH	21	6	27	0	0	0	27	159	12	171	0	0	0	171	198	150	132	32
19	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A NUSAKAMBANGAN	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	283	0	283	0	0	0	283	283	245	116	16
20	LAPAS PEMUDA KELAS II B PLANTUNGAN	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	7	55	13	0	
21	LAPAS TERBUKA KELAS II B KENDAL	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	7	100	7	0	
22	LAPAS TERBUKA KELAS II B NUSAKAMBANGAN	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	12	50	24	0	
23	LAPAS WANITA KELAS II A SEMARANG	KANWIL JAWA TENGAH	0	29	29	0	1	1	30	361	361	0	0	0	361	391	219	179	79	
24	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	3	93	93	93	116	80	0	
25	RUTAN KELAS I SURAKARTA	KANWIL JAWA TENGAH	277	14	291	1	0	1	292	254	25	279	3	0	3	282	574	610	94	0
26	RUTAN KELAS II A PEKALONGAN	KANWIL JAWA TENGAH	88	4	92	0	0	0	92	90	6	96	2	0	2	98	190	197	96	0
27	RUTAN KELAS II B BANJARNEGARA	KANWIL JAWA TENGAH	50	1	51	1	0	1	52	66	0	66	0	0	0	66	118	71	166	66
28	RUTAN KELAS II B BANYUMAS	KANWIL JAWA TENGAH	44	4	48	0	0	0	48	64	10	74	0	0	0	74	122	104	117	17
29	RUTAN KELAS II B BATANG	KANWIL JAWA TENGAH	80	1	81	0	0	0	81	165	6	171	2	0	2	173	254	287	89	0
30	RUTAN KELAS II B BLORA	KANWIL JAWA TENGAH	89	5	94	0	0	0	94	131	3	134	0	0	0	134	228	94	243	143
31	RUTAN KELAS II B BOYOLALI	KANWIL JAWA TENGAH	62	4	66	4	0	4	70	73	5	78	3	0	3	81	151	38	397	297
32	RUTAN KELAS II B DEMAK	KANWIL JAWA TENGAH	94	4	98	5	0	5	103	95	6	101	1	0	1	102	205	100	205	105
33	RUTAN KELAS II B JEPARA	KANWIL JAWA TENGAH	60	0	60	0	0	0	60	142	2	144	0	0	0	144	204	108	189	89
34	RUTAN KELAS II B KEBUMEN	KANWIL JAWA TENGAH	45	0	45	0	0	0	45	86	3	89	2	0	2	91	136	175	78	0
35	RUTAN KELAS II B KUDUS	KANWIL JAWA TENGAH	56	3	59	2	0	2	61	121	2	123	2	0	2	125	186	94	198	98
36	RUTAN KELAS II B PEMALANG	KANWIL JAWA TENGAH	143	4	147	2	0	2	149	98	0	98	6	0	6	104	253	135	187	87
37	RUTAN KELAS II B PURBALINGGA	KANWIL JAWA TENGAH	27	6	33	1	0	1	34	101	7	108	0	0	0	108	142	92	154	54
38	RUTAN KELAS II B PURWODADI	KANWIL JAWA TENGAH	82	3	85	0	0	0	85	130	4	134	0	0	0	134	219	195	112	12
39	RUTAN KELAS II B PURWOREJO	KANWIL JAWA TENGAH	41	1	42	0	0	0	42	57	3	60	0	0	0	60	102	200	51	0
40	RUTAN KELAS II B REMBANG	KANWIL JAWA TENGAH	52	0	52	0	0	0	52	77	3	80	0	0	0	80	132	112	118	18
41	RUTAN KELAS II B SALATIGA	KANWIL JAWA TENGAH	71	17	88	0	0	0	88	42	6	48	0	0	0	48	136	100	136	36
42	RUTAN KELAS II B TEMANGGUNG	KANWIL JAWA TENGAH	66	1	67	0	0	0	67	66	3	69	0	0	0	69	136	101	135	35
43	RUTAN KELAS II B WONOGIRI	KANWIL JAWA TENGAH	55	3	58	1	0	1	59	243	5	248	9	0	9	257	316	250	126	26
44	RUTAN KELAS II B WONOSOBO	KANWIL JAWA TENGAH	63	0	63	0	0	0	63	114	2	116	3	0	3	119	182	150	121	21
Total			2,873	132	3,005	31	1	32	3,037	7,075	505	7,580	151	3	154	7,734	10,771	9,570	113	

Tabel 1.1 Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil Jawa Tengah
Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan

*) Teks merah : Jumlah penghuni melebihi kapasitas

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki	TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
TAL : Tahanan Anak Laki-Laki	TAP : Tahanan Anak Perempuan
NDL : Napi Dewasa Laki-Laki	NDP : Napi Dewasa Perempuan
NAL : Napi Anak Laki-Laki	NAP : Napi Anak Perempuan

Berdasarkan data tersebut di atas yang diunduh pada tanggal 8 Februari 2017, menunjukkan jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara per-UPT Kanwil Jawa Tengah, dalam data tersebut 74% Rumah Tahanan Negara di Kanwil Jawa Tengah melebihi kapasitas.

1.2 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan Rumah Tahanan Negara di Kabupaten Magelang perlu dilakukan karena tiga alasan: pertama, wilayah Kabupaten Magelang belum memiliki Rumah Tahanan Negara, kedua, populasi penghuni Rumah Tahanan Negara di wilayah Kabupaten lain di sekitar Magelang telah melebihi kapasitas dan ketiga, kondisi Rumah Tahanan Negara di wilayah Kabupaten lain di sekitar Magelang belum mempertimbangkan kebutuhan akan *personal space* bagi para tahanan.

Bangunan Rumah Tahanan Negara yang ada sekarang ini belum menerapkan standar kelayakan bangunan Rumah Tahanan Negara. Bangunan Rumah Tahanan Negara seharusnya memiliki ruang sel yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dasar manusia, sarana dan prasarana yang layak dan mampu melayani psikologis tahanan. Untuk mengembalikan fungsi tersebut diperlukan desain baru Rumah Tahanan Negara yang mempertimbangkan *personal space* seorang manusia. Konsep peran fisik bangunan berperan dalam pembentukan psikologis tahanan. Pembangunan dilakukan melalui penataan ruang dalam dan ruang luar dengan pendekatan *personal space*.

1.3 Rumusan Permasalahan

Pembangunan Rumah Tahanan Negara yang baru dan rekonstruksi dilakukan sebagai upaya mengatasi kelebihan kapasitas penghuni Rumah Tahanan Negara. Pembangunan Rumah Tahanan Negara baik, dalam bentuk rehabilitasi, maupun rekonstruksi merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hunian dalam rangka mengatasi kelebihan kapasitas, meningkatkan kualitas pelayanan serta menjamin penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan secara baik.

Kondisi kelebihan kapasitas menimbulkan terjadinya berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan para tahanan, seperti kemungkinan perselisihan antar tahanan serta kasus tindak pidana lainnya. Kelebihan kapasitas juga mengakibatkan menurunnya layanan dan perawatan, rentan gangguan keamanan dan ketertiban, melemahnya kendali dan pengawasan.

Desain arsitektur suatu bangunan memiliki andil dalam pembentukan karakter seseorang. Sehingga desain arsitektur Rumah Tahanan Negara yang baik diharapkan mampu mewadahi fungsi proses pembentukan moral dan karakter manusia yang lebih beradab dan diterima secara baik dalam masyarakat.

Rumusan Permasalahan adalah: “Bagaimana perencanaan dan perancangan Rumah Tahanan Negara di Kabupaten Magelang yang mampu mengintegrasikan aspek pengamanan dan aspek pembinaan melalui penataan ruang dalam dan penataan ruang luar dengan pendekatan *personal space*”.

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

Terwujudnya bangunan Rumah Tahanan Negara yang mampu mengintegrasikan aspek pengamanan dan aspek pembinaan melalui penataan ruang dalam dan penataan ruang luar dengan pendekatan *personal space*, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar seorang manusia, dengan demikian peran fisik bangunan mendukung pembentukan psikologis dan kebiasaan tahanan (ada sinkronisasi sehingga akselerasi proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik).

1.4.2 Sasaran

- a. Intregasi aspek pengamanan dan aspek pembinaan ke dalam tata ruang Rumah Tahanan Negara.
- b. Pendekatan *personal space* pada intregrasi aspek tersebut.
- c. Tata ruang dan tata bangunan yang menerapkan aspek *personal space* pada Rumah Tahanan Negara

Terwujudnya bangunan Rumah Tahanan Negara yang mampu mengintegrasikan aspek pengamanan dan aspek pembinaan melalui penataan ruang dalam dan penataan ruang luar dengan pendekatan *personal space*.

1.5 Lingkup Studi

Bagian-bagian obyek studi yang akan dirancang sebagai penekanan studi berfokus pada ruang luar dan ruang dalam. Bagian-bagian ruang luar dan ruang dalam pada obyek studi yang akan diolah sebagai penekanan studi adalah sintesa arsitektur yang mencakup bentuk, jenis bahan, warna, tekstur dan ukuran/skala/proporsi pada elemen-elemen pembatas,

pengisi, pengaman dan pelengkap ruangnya, yang mengacu pada keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

1.6 Pendekatan Studi

Lingkup pembahasan dalam penulisan ini dititik beratkan pada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur yang akan digunakan sebagai Landasan Program Perencanaan Arsitektur dan Perancangan Arsitektur. Pembahasan dibatasi pada pengertian umum sedangkan pada perancangannya dititikberatkan pada bangunan Rumah Tahanan Negara di Kabupaten Magelang yang secara keseluruhan mencakup aspek fungsional, kontekstual dan arsitektural. Pembahasan diluar bidang arsitektural yang masih berkaitan dengan faktor-faktor perancangan fisik dibahas secara garis besar.

1.7 Metode Studi

1.7.1 Menggunakan metode deskriptif untuk kemudian dianalisa sebagai dasar dalam perencanaan dan perancangan arsitektur. Metode deskriptif meliputi:

a. Observasi

Dilakukan dengan menganalisa fenomena di lapangan serta melalui peninjauan langsung ke obyek studi kasus, guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai bangunan Rumah Tahanan Negara. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui secara jelas kondisi eksisting lokasi untuk perencanaan Rumah Tahanan Negara berdasarkan standar pertimbangan pemilihan lokasi tapak.

b. Studi kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dalam hal ini berupa studi banding literatur yang berkaitan dengan judul baik data informasi dari instansi terkait maupun internet guna memperoleh suatu desain yang diinginkan.

c. Dokumentasi

Dilakukan untuk memperjelas data yang telah diperoleh di lapangan untuk kemudian dianalisa dan dicari permasalahannya serta pemecahannya.

d. *Interview*

Dilakukan dengan pihak ahli dan pihak terkait yang dianggap menguasai, guna melengkapi data primer dari pokok pembahasan.

1.7.2. Metode Komparatif

Pembahasan menggunakan metode komparatif untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya di lapangan diperlukan studi Rumah Tahanan Negara. Area studi komparasi dipusatkan pada Rumah Tahanan Negara di Propinsi Jawa Tengah, sekitar wilayah Magelang. Obyek-obyek studi komparasi diantaranya adalah: Rumah Tahanan Negara Temanggung, Rumah Tahanan Negara Purworejo, Rumah Tahanan Negara Salatiga dan Rumah Tahanan Negara Wonosobo. Data yang didapat kemudian dianalisa melalui komparansi data, dengan membandingkan data primer dari obyek studi dengan data sekunder yang diperoleh, baik dari studi literatur, internet maupun interview dengan pihak terkait, sehingga diperoleh suatu usulan desain solusi untuk diterapkan pada judul.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Rumah Tahanan Negara Magelang adalah sebagai berikut:

BA B I PENDAHULUAN

Memaparkan latar belakang pengadaan proyek, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, pendekatan studi, metode studi dan sistematis pembahasan

BA B II TINJAUAN RUMAH TAHANAN NEGARA DAN TEORI *PERSONAL SPACE*.

Berisi tinjauan pustaka mengenai Rumah Tahanan Negara dari berbagai literatur maupun referensi pendukung yang berkaitan dengan pengertian, sistem, tujuan. Berisi tinjauan pustaka mengenai *personal space* dari berbagai literatur maupun referensi pendukung yang berkaitan dengan pengertian, sistem dan tujuan.

BA B III TINJAUAN KAWASAN

Berisi tentang data administrasi wilayah Kabupaten yang digunakan sebagai tolak ukur dalam perancangan Rumah Tahanan Negara di Kabupaten Magelang.

BA B IV ANALISIS

Berisi pendekatan perencanaan dan perancangan Rumah Tahanan Negara Magelang, yaitu berupa analisis dari pendekatan pemilihan lokasi dan tapak, aspek fungsional, arsitektural, kinerja, kontekstual serta penekanan desain Bangunan Rumah Tahanan Negara.

BAB V KONSEP

Berisi hasil dari analisa ke dalam bentuk konsep dasar landasan perencanaan dan perancangan arsitektur Rumah Tahanan Negara sesuai standar kebutuhan dan usulan pemecahan masalah serta pendekatan perancangan yang akan diaplikasikan dalam perancangan bangunan Rumah Tahanan Negara Kabupaten Magelang.



1.9 Alur Kerangka Berpikir

